
Survey Layanan Publik Pemantauan Frekuensi Radio untuk Radio Amatir Dan Radio Antar Penduduk Indonesia

Public Service Survey on Radio Frequency Monitoring for Amateur Radio and Indonesian Inter Population Radio

Azwar Aziz

Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110

azwar.aziz@kominform.go.id

Naskah diterima: 30 Januari 2014; Direvisi: 18 Februari 2014; Disetujui: 14 Maret 2014

Abstract— Usage phenomenon of radio amateurs and inter population radio in relation with public service factor of radio frequency monitoring, researcher focus on the problem of provision of public services provided by the government on the use of non commercial radio used by individual. This research shows amateur radio and inter population radio enthusiasts are varied, ranging from illegal to the licensed. So is the role of the leader that is always pioneering the development potential of amateur radio and inter population radio to cope in the community benefit. With qualitative methods, depth interviews to obtain the actual condition of public services that have been performed by the government or by the organizations that raise the potential to become a great power in providing communications support relating to disaster related emergency response and other social circumstances. The results showed that the public services provided by the government in the field of enforcement is very less, so that the radio frequencies used by individual radio is not conducive to use, this will cause some impact on the organization's ability to develop itself, community service in support of emergency response communication can occur at anytime.

Keywords— Public services, Amateur Radio, Inter Population Radio

Abstrak— Berlatar belakang fenomena penggunaan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk yang berkaitan dengan faktor layanan publik dari monitor frekuensi radio, dimana peneliti memfokuskan pada permasalahan kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tentang penggunaan radio non komersial yang digunakan oleh perorangan. Penelitian ini memperlihatkan penggiat amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk bervariasi, mulai dari yang tidak mempunyai izin sampai pada yang memiliki izin. Begitu juga peran tokoh yang selalu memelopori tentang

berkembangnya potensi amatir radio dan radio antar penduduk ini untuk mengatasi kemashalatan yang ada di Masyarakat. Dengan metode Kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan kondisi yang sebenarnya dari layanan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak organisasi yang membangkitkan potensi untuk menjadi suatu daya yang besar dalam memberikan dukungan komunikasi berkaitan dengan tanggap darurat terkait dengan bencana dan keadaan sosial lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan publik diberikan oleh pemerintah di bidang penertiban sangat kurang sehingga frekuensi radio yang digunakan oleh radio perorangan ini tidak kondusif untuk digunakan, hal ini akan mempunyai dampak kemampuan organisasi untuk mengembangkan diri, pengabdian masyarakat dalam mendukung komunikasi tanggap darurat yang setiap saat bisa terjadi.

Kata Kunci— Layanan publik, Amatir Radio, Radio antar Penduduk

I. PENDAHULUAN

Negara mempunyai kewajiban untuk melayani, melindungi setiap warganegara dan penduduk yang berada di wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada pasal 28 F berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia. Salah satu kegiatan perorangan yang menggunakan spektrum adalah amatir radio dan radio komunikasi antar penduduk, dimana alat komunikasi juga mengikuti perkembangan teknologi dan mengikuti teknologi maju dan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat amatir dan masyarakat radio antar penduduk Indonesia.

Untuk menjamin terselenggaranya komunikasi radio yang dilakukan dalam upaya latihan diri meningkatkan kompetensi di bidang ke amatiran dan Komunikasi radio antar penduduk yang berguna sebagai tenaga cadangan nasional yang berbasis sosial kemasyarakatan apabila terjadi bencana, tanah longsor, dan lain-lainnya sehingga menjadi kewajiban Negara, dalam pengaturan, jasa ketertiban, keteraturan, dan kepatuhan dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio hanya diberikan oleh Negara.

Dengan semakin berkembangnya teknologi Informasi dan komunikasi dengan pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi radio minat penggunaan semakin tinggi dan pemanfaatan semakin beragam, kegiatan amatir juga berkembang dan dapat memanfaatkan teknologi internet. sehingga tuntutan pelayanan untuk meningkatkan kompetensi keamiran semakin meningkat demikian juga pengguna radio amatir juga semakin meningkat bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan sangat mudahnya mendapatkan perangkat yang digunakan untuk kegiatan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk. Sehingga tumbuh pengguna frekuensi amatir radio dan radio antar penduduk Indonesia yang bekerja diluar frekuensi yang sesuai dengan peruntukannya.

Data keunggulan layanan yang telah dibangun oleh organisasi ORARI dan RAPI sebagai akibat dari pembinaan dari pemerintah yang secara terus menerus dilakukan perlu untuk disajikan secara sistematis untuk diketahui oleh masyarakat umum sebagai tenaga sukarela, penuh antusias dan berjiwa patriot dan ikut mengawal kondisi sosial kemasyarakatan kedepan sesuai dengan kode etik pengguna radio perorangan.

Jadi aktivitas monitoring dan penertiban meningkatkan sosialisasi kepatuhan adalah merupakan layanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika beserta seluruh jaringan Monitoring yang digerakkan secara terkoordinasi oleh Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio seluruh Indonesia. Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio meliputi antara lain monitoring, observasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

Menurut Budiono (Budiono, 2003) mendefinisikan pemerintah yang berorientasi pada pelanggan (*Customer driven government*) yaitu pemerintah yang meletakkan pengguna layanan sebagai hal yang paling didepan. Dimana kepuasan pengguna layanan ditempatkan sebagai sasaran penyampaian tujuan, dengan mendengarkan keluhan.

Meningkatkan kualitas pelayanan Masyarakat dalam aktivitas monitoring perangkat telekomunikasi mengacu peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga mampu melindungi masyarakat penerima layanan dengan menjaga kualitas pancaran alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang menimbulkan gangguan yang merugikan untuk ditertibkan serta mengawasi bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peranan Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio di dalam memberikan layanan publik berupa kenyamanan, di dalam menjaga keteraturan, kepatuhan dalam penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi, sehingga menjamin terjadinya pengembangan diri berupa kompetensi di bidang amatir radio, serta komunikasi radio antar penduduk yang sangat berguna dalam kondisi darurat. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan pokok adalah “Bagaimana kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tentang penggunaan radio non komersial yang digunakan oleh perorangan (ORARI dan RAPI)”?. Menurut Patton (Patton, 1990) merinci berapa jenis, yaitu pertanyaan (ihwal) pengalaman, perasaan dan pengetahuan dari persoalan tersebut diatas dapat diperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan frekuensi radio untuk Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia ?
2. Bagaimana ketaatan dan tingkat kepatuhan para anggota Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia terhadap Peraturan Perundangan dan Disiplin Organisasi ?
3. Bagaimana pembinaan penggunaan frekuensi radio untuk Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia ?
4. Bagaimana pemanfaatan perkembangan teknologi terhadap Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia ?

Dengan memperhatikan hal tersebut diharapkan kajian ini dapat menghasilkan analisis dan masukan dalam penentuan kebijakan membangun keunggulan layanan, melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kepatuhan pengguna spektrum frekuensi radio khususnya pengguna radio perorangan yang sifatnya non komersial tetap diperhatikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan memetakan situasi sosial di bidang pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara lebih mendalam, serta menemukan hipotesis atau konsep maupun teori. Sasaran penelitian ini sebagai masukan bagi pemerintah dalam penataan kembali terhadap kebijakan pelayanan yang berkaitan dengan kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio bagi amatir radio dan radio antar penduduk.

Karena pengguna spektrum frekuensi radio sangat luas maka dibatasi khusus dalam layanan publik di bidang penggunaan pita frekuensi radio untuk Amatir radio dan radio antar penduduk serta keteraturan penggunaannya baik teknis maupun non teknis. Dalam penelitian ini untuk membatasi

supaya pembahasan yang lebih fokus lagi dan tidak melebar, untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian maka kegiatan ini dirinci sebagai berikut :

1. Mengkaji layanan publik yang dilakukan oleh UPT Balmon
2. Mengkaji dari segi pandangan pengurus dan anggota ORARI dan RAPI layanan yang diberikan oleh pemerintah.
3. Mengkaji usaha-usaha untuk membangun keunggulan pengembangan orari dan Rapi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Layanan Publik

Dalam tinjauan pustaka ini akan melihat layanan publik yang otoritasnya selalu bergeser yang lebih berat kepusat atau ke daerah sesuai dengan situasi saat itu. Proses layanan publik pada era reformasi yang sudah beberapa penggantian pemerintahan sudah mengarah kepada keterbukaan /transparansi, terbuka dan jujur namun masih jauh dari harapan tergantung pada kemampuan perangkat dan SDM yang mengoperasikannya. Pengalaman menunjukkan Terpusatnya sistem birokrasi ditandai dengan rendahnya inisiatif dan peran dari birokrasi pemerintah lokal. Sebab semua inisiatif kebijakan dan otoritas formal berasal dari pemerintah pusat.

Pemanfaatan spektrum frekuensi radio tidak terlepas dari penanganan gangguan frekuensi radio yang sudah ada perlu dikaji apakah berjalan ditempat atau perlu dilakukan perbaikan mutu penanganan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Didalam perbaikan mutu pelayanan pembinaan diperlukan perbaikan organisasi yang mempunyai sistem administrasi yang tertib, Seperti yang dikatakan Charles A.Beard, tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari Administrasi. Kelangsungan Hidup pemerintahan yang beradap itu sendiri sangat tergantung pada kemampuan dalam membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu memecahkan masalah masyarakat modern.

DR. Hardiyansyah, dalam sinopsis Buku kualitas pelayanan publik, menyebutkan kualitas pelayanan publik selalu menarik untuk dikaji, dan dibahas karena masyarakat selalu mengalami dinamika diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mengalami perkembangan yang pesat. Seiring dengan hal tersebut , tentu, konsep, dimensi, indikator-indikator tentang kualitas layanan publik akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut akan menjadi modal bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Denhardt & Denhardt (Denhardt & Denhardt, 2003) dalam bukunya *Governance administration and development making the state work*, menegaskan bahwa pelayanan publik seharusnya tidak berfokus pada kepentingan pelanggan atau pengguna jasa (*customer atau client*) tetapi harus berorientasi

pada kepentingan masyarakat atau warga Negara (Citizen). Dalam buku “Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep teori dan Isu) karangan Yeremias T. Keban, pergeseran paradigma dalam administrasi publik menyebabkan berobahnya posisi masyarakat sebagai pengguna layanan kini dipandang sebagai citizen yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya. Pemenuhan kebutuhan ini termasuk pemberian layanan dari pemerintah.

Banyak pendapat para ahli mengenai teknologi informasi, diantaranya seperti yang dikemukakan dalam penelitian (Widowati dan Achjari, 2004) yang menyatakan bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Sedangkan Sistem informasi menurut Sutedjo (2002) dalam (Budiawan, 2012) dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan yang mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi, dengan kata lain, sistem informasi merupakan kesatuan elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan dan membuat kontrol terhadap jalannya perusahaan.

B. Penelitian sejenis yang terdahulu

Ngorang Plipus, Pelayanan Publik Aparatur Negara dalam Perspektif Etika Pelayanan Relevansinya bagi Pelayanan Publik yang Etis di Indonesia, Hasil Penelitian menemukan bahwa bahwa pelayanan yang buruk tidak hanya disebabkan oleh kehendak buruk individu, juga disebabkan oleh struktur didominasi dalam tatanan sosial pelayanan publik. Etika pelayanan tidak hanya berkaitan dengan kode etik yang berisikan aturan moral yang menuntun aparatur negara di dalam pelayanan publik, juga berkaitan dengan tujuan, dimensi aksi dan dimensi sarana pelayanan publik.

C. Perkembangan Radio perorangan (Amatir radio dan Radio Antar Penduduk)

Perkembangan percobaan pengiriman sinyal lewat gelombang radio terkenal dengan nama Heinrich Hert, penemu gelombang hertz tahun 1888, selanjutnya dengan nama besar Guglielmo Marconi melakukan berbagai percobaan sehingga berhasil mengirimkan sinyal radio melewati lautan atlantik tahun 1901.

D. Radio Amatir

Pengertian radio amatir dapat juga diuraikan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa radio adalah siaran (pengiriman) suara atau bunyi melalui udara, sedangkan amatir adalah orang yang melakukan atas dasar kesenangan, bukan nuntuk memperoleh nafkah. Dengan digabung kedua pengertian tersebut didapatkan pengertian adalah siaran (pengiriman) suara atau bunyi melalui udara yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hobi bukan untuk mencari

nafkah, tetapi adalah untuk mencari kesenangan terhadap hobby tersebut. Hal ini sesuai dengan anggaran dasar Amatir radio Sehingga dalam melakukan kegiatannya berlandaskan kode etik Amatir Radio.

ORARI saat ini telah berusia 42 tahun dan hingga saat ini telah mempunyai 32 perwakilan pada tingkat ORARI Daerah serta 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Organisasi Amatir Radio Indonesia merupakan bagian dari *International Amateur Radio Union* (IARU) serta patuh terhadap peraturan *International Telecommunication Union* (ITU) dengan berbagai kegiatan Amatir Radio Nasional dan Internasional.

Untuk memberikan gambaran mengenai amatir Amatir Radio selanjutnya berdasarkan berdasarkan keputusan Menteri Kominfo No 33 Per/M/Kominfo/08/2009, adalah sebagai berikut :

1. Amatir Radio adalah setiap orang yang memiliki hobby dan bakat di bidang teknik elektronika dan komunikasi tanpa maksud komersial.
2. Kegiatan Amatir radio adalah kegiatan latihan diri saling berkomunikasi dan penyelidikan teknik radio yang diselenggarakan para amatir radio
3. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar dan penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio. Stasiun radio amatir adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan amatir radio.

E. Organisasi Amatir Radio

ORARI Pusat adalah merupakan Induk Organisasi dan berkedudukan di Ibukota Negara ORARI Pusat di pimpin oleh Ketua Umum ORARI. Mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan Peraturan yang sejalan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku bagi Amatir Radio terhadap segenap anggota dan mengeluarkan instruksi melalui Pengurus ORARI Daerah serta meminta laporan atas pelaksanaannya.

ORARI Daerah adalah bagian dari Organisasi di untuk tingkat daerah dan berkedudukan di Ibukota Propinsi. ORARI Daerah dibentuk pada tiap Propinsi apabila terdiri sekurang kurangnya tiga (3) Organisasi Lokal, yang pembentukannya ditetapkan oleh Ketua Umum ORARI.

ORARI Lokal adalah bagian dari Organisasi yang dibentuk pada setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tertentu dapat dibentuk sampai tingkat Kecamatan dengan jumlah anggota minimal 50 (lima puluh) orang dan/atau atas Kebijakan Ketua ORARI Daerah, Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah. ORARI secara hukum berada dibawah pembinaan Ditjen SDDPI. Secara Organisatoris, ORARI berada di bawah Internasional Amateur Radio Union (IARU).

F. Radio Komunikasi Antar penduduk Indonesia (RAPI)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi khususnya dengan perkembangan pemanfaatan frekuensi radio

sebagai media gelombang pembawa untuk *voice* (suara), data, dan gambar telah melahirkan kemudahan dalam hubungan antar manusia yang dapat melawan jarak, baik dekat maupun jauh, yang di Negara asal (USA) berkembangnya disebut *The Citizens Radio Service* (CB-Citizen Band).

Kalau ditelusuri dari sejarah berdirinya Radio untuk komunikasi perorangan dimana warga Amerika tanpa ujian, dengan latar belakang tanpa pengetahuan teknis radio dapat mengudara dan mendapat lisensi Oleh FCC (*Federal Comunicatio Commicion* tahun 1945 mnetapkan alokasi frekeunsi 460 – 470 Mhz yang dapat diizinkan. Penetapan tersebut belum banyak diminati perangkatnya mahal dan jangkauannya pendek, sehingga tahun 1957 FCC menampung usulan untuk penambahan alokasi frekuensi *Citizen Radio services* menjadi 27230 MHZ dan berlaku mulai tanggal 11 September 1958. Alokasi yang baru tersebut sangat menarik bagi warga Amerika karena perangkatnya murah dan daya jangkanya juga jauh, sehingga radio CB ini menjadi sangat populer di masyarakat Amerika yang digunakan untuk bertemu dengan teman baru, lalu lintas , gawat darurat serta komunikasi jarak jauh (DXing). Begitu juga instansi yang bersifat layanan masyarakat aktif menggunakan digunakan pada kepolisian, SAR, pemadam kebakaran, Rumah sakit, mereka menyediakan kanal 9 untuk gawat darurat, dan sangat efektif untuk menggerakkan instans terkait, dengan panggilan darurat seluruh instansi terkait segera siaga, CB langsung termobilisasi untuk mengatasi situasi darurat.

Untuk Indonesia kalau ditelusuri masuknya CB radio sekitar tahun 1977 dan berkembang dengan cepatnya Radio CB (11 meter) diawali dalam bentuk oleh keluarga, manfaatnya sangat terasa sehingga dari mulut ke mulut berkembang dengan pesatnya dan menjadi hobby mendatangkan alat komunikasi dengan alokasi Frekuensi 27 Mhz, walupun belum secara resmi di Indonesia. Pada awal tahun 1980. dilakukan penertiban terhadap para pengguna CB radio oleh garnizun ibukota, sehingga timbul pemikiran dalam kondisi pembangunan nasional sarana komunikasi masyarakat yang murah, praktis diperlukan disamping penyediaan komunikasi masih sangat mahal. Oleh karena potensi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembangunan kemasyarakat.

Usulan Garnizun mendapat perhatian pemerintah dengan mulai menata penyelenggaraan KRAP melalui SK Menteri Perhubungan S1 11/HK 501/Phb-80 tanggal 6 oktober 1980 tentang Perijinan Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk dengan menggunakan perangkat HF dan bekerja pada frekuensi 29.960-27.450 Mhz yang dibagi dalam 40 kanal.

Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri perorangan, termasuk didalamnya untuk penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk. Setiap anggota organisasi RAPI mempunyai tanggung jawab; 1) membantu pemerintah untuk mengatasi kebutuhan fasilitas telekomunikasi dalam hal keselamatan negara, jiwa manusia (SAR), ketertiban masyarakat, bencana alam dan kecelakaan;

2) menerima dan menyalurkan berita-berita sebagaimana dimaksud diatas kepada lembaga yang berhak menerimanya.

G. Etika berkomunikasi sebagai basis kekuatan ORARI dan RAPI

Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan pelayanan publik, dalam kenyataannya etika merupakan satu elemen yang sangat menentukan dari kepatuhan anggota ORARI dan RAPI dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Hal ini terlihat dari kepuasan anggota terhadap anggota yang lain dalam hubungan komunikasi dan menunjukkan suatu keberhasilan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam literature administrasi publik (Henry, 1995). Dari hari ke hari selalu muncul pelanggaran etika atau *misconduct* didalam instansi pemerintah. Di Amerika Serikat sekalipun banyak pejabat publik yang terlibat dalam perilaku yang tidak terpuji. Dewasa ini, etika terus mendapat sorotan dalam literature administrasi Publik (Cooper, 1998; Donahue, 2003; Berman, 2003) Etika dapat menjadi suatu faktor yang mensukseskan tetapi juga sebaliknya menjadi pemicu dalam menggagalkan tujuan kebijakan, struktur organisasi serta manajemen Publik.

Menurut (Hallowell, et al., 1996) mengeksplorasi kebermaknaan kualitas pelayanan internal (*internal services quality*) terhadap kepuasan kerja dan kepuasan konsumen. Terdapat dalam kualitas pelayanan internal yaitu : (1) Penyelarasan sasaran, (2) Dukungan Manajemen, (3) Penghargaan dan Pengakuan, (4) Kerjasama Tim, (5) Kebijakan dan Prosedur, (6) Komunikasi, (7) Pelatihan dan (8) Peralatan.

H. Kebijakan Komunikasi Radio Perorangan serta Aktivitas ORARI dan RAPI

Kebijakan (*Policy*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai *guide to action*. Kebijakan merupakan suatu panduan umum yang akan mengarahkan pembuatan keputusan yang akan diambil oleh para pembuat keputusan. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan, masyarakat pada awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2008).

Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas umum lainnya (air bersih listrik). Kebijakan sosial merupakan tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Dasar hukum pelayanan publik, pelimpahan kewenangan menyangkut pelayanan perizinan dan non perizinan, dalam meneliti kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. Pelayanan Publik oleh aparaturnya Negara merupakan kewajiban secara konstitusional, hal ini dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat “ Negara bertujuan melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Pelayanan oleh aparaturnya Negara menjadi kewajiban untuk melindungi dan melayani kebutuhan masyarakat. Hubungan timbal balik tidak diarahkan menjadi hubungan komersial, tetapi sering terjebak dengan menjadi kepentingan komersial, tanpa mengindahkan etika.

I. Peraturan Perundang-undangan

Dalam undang-undang No 36 tahun 1999, tentang Telekomunikasi, dapat dilihat bahwa pengaturan tentang penggunaan radio untuk perorangan, pasal 9 ayat (4) huruf a, yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perorangan adalah penyelenggaraan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan perseorangan, misalnya amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk.

1) Peraturan kominfo No 33/Per/M.Kominfo/08/2009, tentang penyelenggaraan Amatir Radio.

Dalam kebijakan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal, pada pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam melakukan pengawasan meliputi pengawasan administrasi dan pengawasan teknik, dengan cara memeriksa ketentuan teknis instalasi stasiun radio, menguji pancaran pada beberapa frekuensi tertentu dan memeriksa izin amatir radio (IAR).

Organisasi Amatir radio membantu UPT dalam mengawasi penggunaan frekuensi radio, demikian juga setiap amatir radio harus memberitahukan kepada amatir radio lainnya yang menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi lainnya. Bila seorang amatir radio mengetahui atau diberitahu bahwa pancaran radionya menimbulkan gangguan terhadap stasiun komunikasi lainnya atau terhadap peralatan elektronik masyarakat, maka yang bersangkutan wajib segera menghentikan pancaran radionya serta berupaya menghilangkan gangguan tersebut secepat mungkin.

2) Peraturan Menteri Kominfo No 34/Per/M.Kominfo/8/2009, tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk

Alat dan perangkat komunikasi radio antar penduduk yang hanya digunakan untuk komunikasi dalam negeri, dalam penyelenggaraan hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota digunakan untuk pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan organisasi, sumber bantuan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan kepramukaan, olah raga, sosial kemasyarakatan dan penyelenggaraan kemanusiaan lainnya. Serta penyelenggaraan berita marabahaya, bencana alam pencarian dan pertolongan (SAR).

Kanal Frekuensi yang diizinkan pada pita HF untuk pelaksanaan penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) adalah Frekuensi 20.960 Mhz sampai dengan 27.410 Mhz yang dibagi menjadi 40 kanal. Merupakan pita yang digunakan secara bersama dan tidak khusus

diperuntukkan untuk satu orang pemegang KRAP dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektronika yang merugikan.

Unutuk kanal VHF dalam penyelenggaraan KRAP adalah Frekuensi radio 142.000 Mhz sampai dengan 143.600 Mhz dengan spasi 20 Khz. Yang merupakan pita frekuensi digunakan secara bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi satu orang pemegang KRAP dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektronika yang merugikan.

Kanal frekuensi radio ysnng diizinkan untuk repeater (pancar ulang) adalah frekuensi RX 142.000 Mhz dan 142.025 Mhz., sedangkan TX 143.3550 Mhz dan 143.575 Mhz.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian.

Pendekatan kualitatif melalui key informan dilakukan dengan wawancara mendalam tentang situasi sosial oleh sebagian orang dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang masih kabur, kompleks dan dinamis, untuk memahami situasi sosial secara lebih mendalam untuk menyimak dan memahami bagaimana para amatir radio menginterpretasikan berbagai kejadian didalam kehidupan mereka dalam berorganisasi, upaya latih diri dalam teknik radio dan berkomunikasi. Pendekatan induktif menarik kejadian melalui pengalaman salah satu key informan atau berbagai pengalaman dari beberapa orang. Menempatkan penulis kedalam ruang publik sebagai pembawa persoalan yang penuh personalitas "*That gives the writer a public personal*", (Denzin, 2005)

B. Teknik Penelitian

Dalam membuka seluruh data yang telah terkumpul dilakukan penandaan tema-tema dala kategori yang dinilai mempunyai kesamaan maupun pertautan tertentu, dalam penandaan dilakukan dalam satu tabel. Digunakan penelitian kualitatif untuk menemukan hipotesis atau teori. Situasi sosial merujuk pada aliran perilaku (aktivitas) yang dilakukan orang (aktor) dalam suatu lokasi tertentu.

C. Informan penelitian

Dari segi istilah populasi dan sampel, menurut Hamidi (Hamidi, 2010) pada Penelitian kualitatif tidak perlu menggunakan konsep populasi dan sampel, tetapi menggunakan istilah konsep Informan (responden penelitian) yang memenuhi kriteria, melalui teknik *snow-ball* setelah ditentukan kriterianya. Jumlah respondennya diketahui ketika pengumpulan data mengalami kejenuhan. Pengumpulan data diawali dengan mewawancarai key informan. Informan kunci adalah subjek yang pandangannya dan tuturannya jelas. Pandangan dan tuturannya dapat digunakan dalam analisis pendahuluan. Kalau di UPT Balmon dimulai dari key Informan senior atau Kepala UPT, dan berhenti pada responden yang sudah tidak memberikan informasi yang baru lagi. Jumlah responden didasarkan pada suatu proses pencapaian kualitas informasi yang diberikan.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data secara langsung dari lapangan di 5 lokasi, yaitu Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Jawa Barat (Bandung), Propinsi DI Yogyakarta dan Propinsi DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau (Batam). Dalam pemilihan lokasi ini diambil 2 daerah rawan bencana Gunung berapi dan tanah longsor yaitu Sumatera Barat dan Yogyakarta Lingkar Merapi. Kepulauan Riau diambil karena kaitan dengan pulau terluar, sedangkan Jakarta dan Bandung sebagai indikator kemajuan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk.

E. Pengumpulan Data

Teknik dalam Pengumpulan data sekunder melalui teknik dokumentasi sumber data base Direktorat Oparasi SDPPI. Dilakukan studi kepustakaan berupa data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen, jurnal ilmiah hasil penelitian sebelumnya, terutama yang berhubungan dengan objek penelitian. (Purwanto, 2007) mengartikan data sekunder data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian data sekunder ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan.

Sedangkan teknik pengumpulan data primer adalah teknik rekam, hasil wawancara yang mendalam. Untuk validitas dan realibilitas data dilakukan dengan triangulasi data dari sumber informan yang berbeda. Proses wawancara untuk mendapatkan Data lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara mendalam kepada Key Informan, narasumber yang memenuhi kriteria melalui teknik *Snow Ball*, dari 5 (lima) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di 5 (lima) lokasi penelitian, Pedoman dalam melaksanakan pekerjaan lapangan menurut (Emzir, 2010) : 1) Pengambilan catatan lapangan bersifat deskriptif; 2) Kumpulkan suatu variasi informasi dari perspektif yang berbeda; 3) Validasi silang dan triangulasi oleh pengumpulan jenis berbeda dari data; 4) Gunakan kutipan menggambarkan program partisipan dalam istilah mereka sendiri; 5) Pilih Informan kunci secara bijak dan menggunakan secara hati-hati.

Dalam wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan persepsi dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan radio perorangan. Yang ada didaerah penelitian dimana pengalaman yang diminati oleh key informan dapat menjadi landasan percakapan yang mengalir dan berbagai informasi diseputar topik penelitian. Reaksi secara spontan yang mengalir dari key informan dapat merefleksikan gagasannya dan dihubungkan dengan kebijakan yang ada. Kadangkala peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur mengingat peneliti bergaul dengan key informan sepanjang hari untuk mencari informan lainnya, hal ini lebih fleksibel dan banyak menyangkut hal-hal yang terlupakan sebelumnya untuk digali lebih lanjut.

F. Teknik Analisis Data

Kajian ini menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif dengan menetapkan tahap-tahap kegiatan terhadap data yang sedang dan sudah dikumpulkan dan tujuan akhirnya untuk ditarik suatu kesimpulan berupa konsep atau hubungan antar konsep.

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Sekunder

1) Kegiatan Amatir Radio

Untuk mendapatkan gambaran kegiatan Amatir Radio berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui internet, (M. Faisal YB1PR, dan Musa Suraatmadja YBOMOS) dapat diungkapkan kembali setelah dirobah yang pada intinya kegiatan amatir radio adalah kegiatan latih diri dan penyaluran hobby.

Ajang latih dalam kesiagaan komunikasi darurat (*emergency communication*) untuk menghadapi marabahaya dan bencana sewaktu-waktu mungkin akan timbul kesiagaan dilakukan oleh ORARI daerah dengan mendatangkan kelompok penggiat amatir radio tingkat lokal dengan mendirikan stasiun darurat di lapangan atau di bukit, dengan latihan ini berlomba untuk dapat melakukan hubungan/kontak sebanyak-banyaknya tanpa menggandakan catu daya komersil/PLN, tapi mereka menggunakan catu daya battery, genset jinning atau solar cell, hal ini mengingatkan bila kejadian marabahaya atau bencana alam catu daya komersial tidak berfungsi. Tradisi amatir radio yang bekerja sungguh-sungguh tanpa pamrih dengan membawa peralatan komunikasi sendiri untuk ikut memberikan bantuan komunikasi darurat sampai komunikasi normal dari dan ke daerah bencana dapat berfungsi kembali.

Organisasi ORARI dan RAPI sangat solid dalam menjalankan organisasi yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun dalam menyikapi peraturan perundangan yang terkait. Namun tantangan ORARI kedepan dengan melihat fenomena global dengan perkembangan teknologi TIK dimana dengan teknologi memunculkan inovasi baru di bidang perangkat TIK, model baru yang lebih sensitive, lebih luas volume peredarannya, siklus model semakin pendek, sehingga ORARI secara tidak langsung terjebak dari sistem ini.

2) Pemegang Izin Amatir Radio

Data dari pemegang IKRAP Izin Komunikasi Radio antar penduduk yang masa lakunya 5(lima) tahun mulai dari tahun 2010 akan diperpanjang baru tahun 2015. Jadi data base IKRAP setiap tahun dapat menjaring kedalam data base

sehingga untuk mendapatkan data dapat dijumlahkan menjadi data akhir. Data tersebut menggambarkan jumlah pemegang Izin Amatir radio dan perkembangannya setiap tahun. Data ORARI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Sumatera Barat. Dapat dilihat dalam tabel seperti berikut :

TABEL 1. IZIN AMATIR RADIO (IAR)

Wilayah	Tingkatan	2010	2011	2012	2013
Jakarta	Siaga	46	278	500	450
	Penggalang	24	92	133	139
	Penegak	4	43	73	56
Bandung	Siaga	39	781	613	1263
	Penggalang	13	30	107	221
	Penegak	2	14	23	46
Yogya-karta	Siaga		225	249	587
	Penggalang		26	36	77
	Penegak		22	7	24
Padang	Siaga	7	87	253	158
	Penggalang	7	17	40	22
	Penegak	1	6	14	3
Batam	Siaga		28	20	19
	Penggalang		10	8	17
	Penegak		2	2	2

Sumber : Data base Direktorat Operasi

Sedangkan data pengguna komunikasi radio antar penduduk adalah sebagai berikut :

TABEL 2. RADIO ANTAR PENDUDUK IZIN PERPANJANGAN DAN BARU

Wilayah	Tingkatan	2010	2011	2012	2013
Jakarta	Baru	18	107	172	186
	Perpanjang	21	121	291	104
Bandung	Baru		183	720	666
	Perpanjang		125	975	975
Yogya-karta	Baru			54	301
	Perpanjang			63	244
Padang	Baru	83	239	44	282
	Perpanjang	18	73	35	103
Batam	Baru				38
	Perpanjang				5

Sumber : Data base Direktorat Operasi

Untuk data pembentukan kompetensi melalui ujian amatir radio ada di masing-masing Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang menjadi objek penelitian.

B. Data Primer

Pengumpulan data primer tahap pertama dilakukan untuk mempersiapkan secara administrative maupun teknis, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penelitian pelayanan publik yang dilakukan oleh UPT Monitoring. Dalam melaksanakan wawancara mendalam dilakukan dengan pihak penggiat Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk pada daerah penelitian.

1) Hasil Wawancara di Sumatera Barat

a) Suri Hamdasir (Wakil Ketua RAPI Daerah Sumatera Barat, J2 03 AJ, Y 560D)

Kondisi pengguna RAPI di Sumatera Barat, KRAP tahun 1980, berubah menjadi RAPI merupakan perpanjangan tangan dari kominfo. Problem perizinan yang dikirimkan ke Pusat misalkan Desember 100, tetapi sampai saat ini belum keluar. Sistem pakai email dari copy hasil pembayaran BHP.

Masih belum sepenuhnya kebijakan ini dapat diterapkan, sebetulnya di propinsi ada juga Dinas Kominfo yang tergabung dengan Dinas Perhubungan. Orang sekarang ini, kalau birokrasi berbelit-belit, sistem di KRAP beda sistem pakai email, ada bukti setoran dan ada rekening giro yang langsung ke Pusat. Proses internal para calon anggota mendapatkan kartu anggota. Percepatan Izin diperlukan oleh para calon anggota Rapi, demikian juga kegiatan Sosialisasi tentang Peraturan Perundangan-undangan, Kepada Biro Hukum di Kabupatæn dan Kota, atau tingkat Propinsi. Diperlukan Nara sumber dari Kominfo dalam mensosialisasikan regulasi yang terkait dengan Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk. Gate Way masih ada yang positifnya, sehingga sampai ke luar negeri, karena anggota RAPI banyak sebagai pilot, nakhoda kapal, Sumber dana berasal dari patungan kalau ada kegiatan, sosialisasi bahwa uang yang dibayarkan anggota adalah biaya, kegiatan cenderung untuk penanganan bencana.

Gate way belum banyak efek, khusus yang mempunyai server. Yang mengganggu, adanya intrik sosial terutama bagi disuruhnya masyarakat karena pergeseran untuk mengganggu. ORARI sudah bisa dibuka dengan frekuensi melihat kedalam dicoba oleh ORARI secara teknis, antara ORARI dan RAPI saling membutuhkan.

b) Daliva Markessi Ketua RAPI Kabupaten Solok, Pengamat Gunung berapi Gunung Talang.

Sehebat apapun teknologi komunikasi kalau berhadapan dengan bencana alam semua akan tidak akan berfungsi seperti telepon seluler, telepon fixed, hanya komunikasi radio 2 meter band atau single band belum mampu dikalahkan yang masih tetap dapat difungsikan, karena di Sumatera barat dapat merasakan gempa Mentawai dan diikuti oleh Gunung Talang tahun 2005, gempa sumani, gempa Solok, gempa Padang semua perangkat elektronika, semua hubungan putus kecuali hubungan radio antar penduduk dan amatir radio.

Jadi informasi yang betul-betul akurat saat itu betul-betul radio dua meter, atau *single band*. Jadi pengguna radio

Sumatera Barat sedikit melekat pada kebencanaan, sehingga ada suatu Motto, "Bencana dimanapun di Sumatera Barat RAPI hadir disana " untuk menginformasikan dari titik bencana. Kalau dilihat regulasi yang ada yang masih kurang adalah sosialisasi, aturan sudah dibikin, berupa Undang Undang, Peraturan Menteri, namun itu tidak sampai pada anggota RAPI, baru hanya sampai sebatas pengurus daerah atau pengurus wilayah paling jauh.

Kejadian di Pasaman Barat dihimpun bantuan secara gotong royong oleh anggota RAPI, kemudia kita antar pada titik bencana tidak ada sedikitpun segi bisnisnya. Jadi betul-betul melekat segi kemanusiaan dan sosial, banjir bandang di Muararo labuh, banjir di Payakumbuh, banjir di Painan dalam waktu yang berdekatan, RAPI tetap paling depan, sampai saat ini pemerintah daerah tidak ada perhatian, itu bisa kita pertanggung jawabkan, kita cari bantuan sendiri, diantar sendiri oleh Organisasi RAPI, Jadi sepertinya perlu juga pemerintah daerah dilibatkan dalam pembinaan Anggota RAPI, berdasarkan tingkatan yaitu mulai dari tingkat loka oleh Camat, kalau wilayah kabupaten/Kota, tentu Bupati atau Walikota kalau Daerah Pemerintahan Propinsi Gubernur. Untuk Anggota di kabupaten Solok sekitar 60 orang. Dan kota Solok sekita 40 orang lebih, jadi sekitar 100 orang lebih kurang.

Jangkauan dari Radio Antar Penduduk dapat meliputi Sumbar dan Propinsi Riau, sedangkan Propinsi Riau sudah Region 4 dan Sumbar di region 3, sehingga kalau dilihat dalam peraturan tentu melanggar, tapi dilihat dari topologi daerah kabupaten Solok yang mempunyai ketinggian 1.393 MpdL, dapat menjangkau Propinsi Riau dan suaranya lebih dekat ke Propinsi Riau. Masalah kebencanaan, RAPI selalu tanggap sesuai dengan harkatnya tanpa dikomando, langsung turun ke lapangan contoh untuk banjir bandang, sudah merupakan panggilan jiwa, betul-betul independen. Melalui Gate untuk komunikasi dari Banda Aceh hingga Irian, pakai IP, ada delay, dimanfaatkan teknologi saat ini, pakai modem internet, kalau ngomong harus gantian.

Dalam Tour De Singkarak, anggota RAPI ditempatkan di daerah yang strategis. Kawan-kawan ditempatkan di Pos pakai HT untuk memantau Tour De Singkarak, tempat finish sudah tahu bahwa peserta diketahui sudah berangkat dan didengar oleh banyak orang. Kalau orang Radio lebih membutuhkan Radio dari pada HP. Untuk Tor De Singkarak finishnya ada di Singkarak, Kota Solok, sesuai dengan routenya. Harga perangkat radio, untuk memajukan kondisi sosial, diperlukan radio, kemana jalan selalu pakai radio.

c) Haji Afrizul dan Bundo (Ketua RAPI Bukittinggi)

Jumlah anggota RAPI di Bukittinggi ada sekitar 150 orang, Anggota dibina melalui arisan dan cek in anggota sekali seminggu, untuk aktifnya anggota, Sebelum ini pengurusan hanya sering terlambat, yang perlu sekali adalah tata Tertib komunikasi diperlukan binaan oleh Kominfo, Untuk kabupaten dan Kota kurang pantauan oleh kominfo Pusat, Sosialisasi terbatas hanya terhadap pengurus,

seharusnya sosialisasi terhadap pemakai. Yang liar, belum punya izin. banyak yang belum tertib.

Setidak-tidak ada komunikasi dengan pemerintah daerah dapat mendukung apa yang bisa diberikan. Kalau kami mendekat ke Kominfo, takut mendahului atau ingin minta bantuan, secara organisasi, kalau ada orang yang hilang di Pegunungan kami turun, gempa di Guniung Tuo, Gunung tandikat, Rapi membuka jalan, karena jalan tertutup, Kerja nyata kami telah terbukti. Melakukan kerja nyata di daerah. Kalau membuat Posko, untuk bantuan lebaran, bekerja di Posko dekat dengan Posko Polisi, Laporan belum dibukukan masih disimpan dokumen bagi masing-masing pengurus, Dalam kegiatan tamu yang keliling Indonesia.

d) Yusman Karim (Om bes) ORARI Sumatra Barat

Untuk ORARI kalau anggota tidak ada yang mengganggu, jadi bagi yang tidak mempunyai izin sering mengganggu, kalau minta informasi, kemudian datang lagi untuk minta hal sama. Pembinaan telah dilaksanakan melalui ujian 2 kali setahun. Perangkat yang digunakan bagi yang digunakan dibeli sendiri atau dipinjam dan sering mengganggu. Pengurus ORARI telah membuat Tujuan operasi, tetapi tidak dilaksanakan oleh Balmon, kalau ada Cuma tujuan lainnya atau dengan pengguna frekuensi lainnya.

e) Wakil Ketua ORARI Sumatera Barat (Martinus Effendi)

ORARI dalam perkembangannya telah bisa berhubungan dengan Pekanbaru dan Jambi setelah dikuatkan dengan repeater di Gunung Singgalang dan Gunung padang, sehingga hubungan dengan Kota Solok biasanya dapat sekarang sudah bisa berkomunikasi.

Yang paling penting adalah sweeping, ada tetapi buat yang perorangan terlewatkan, kalau bisa sweeping khusus ORARI dipisahkan dengan RAPI, jangan digabung, karena keduanya saling membocorkan. Anggota ORARI banyak yang illegal, Tujuan operasi untuk ORARI terlewatkan. Bagi calon anggota RAPI diberika izin sementara secara resmi. Kalau RAPI dibuat secara resmi surat tanda anggota sementara bagi calon anggota, ORARI tetap merupakan melalui ketentuan internasional. Tingkat adalah merupakan pembinaan bagi setiap anggota ORARI, walaupun sudah YB tetap masih jauh, Dengan Radio dapat berhubungan dengan dunia, dan diakui dunia, melalui internet masih eksperimen ORARI, masing mempunyai server karena percobaan dibiarkan, range frekuensi sudah diatur, peruntukan untuk repeater, bencana dan lain-lain.

f) Bapak Iwan, Kasi Operasi Pemeliharaan Balmon Kepulauan Riau

Dalam pengumpulan data primer dilakukan wawancara secara mendalam dimulai dari pejabat dan staf di Balmon Kelas II Batam yang akan menjadi key informan dalam penelitian ini.

Untuk Implementasi peraturan Perundangan yang harus diterapkan terhadap anggota ORARI dimulai dengan

mengikuti ujian secara bertingkat balmon memprogramkan 3 kali 1 tahun tahun 2012 dilakukan di kepulauan Anambas, Batam dan di Kabupaten Karimun. Tahun 2013, program tiga kali juga yaitu, di natuna, Batam dan rencana di Tanjung Pinang , karena tidak ada anggota dialihkan ke Tanjung Balai karimun ditunda dulu, terdapat 3 kali UNAR juga terdiri kepulauan Anambas, belum ada anggota, inventaisasi anggota, Di Pulau Anambas diurus bagi anggota yang telah punya izin ditunjuk sebagai pengurus, tahun ini mereka akan membenahi lokal, termasuk bagi yang telah mengikuti ujian akan rapat dan memprogramkan ujian tahun depan. Tahun ini masih ada anggaran untuk Kepulauan Anambas. Tanjung Pinang juga telah dibuat surat untuk ujian pada bulan ini, tetapi oleh pengurus baru belum dilantik, mereka belum berani melakukan ujian, anggota peserta ujian belum ada anggota, jadi batal, sedangkan BATAM sekitar bulan Agustus nantinya. Dalam penyelenggraan ujian diberi kewenangan penuh.

Ketaatan para anggota Radio komunikasi untuk perorangan ini, terhadap regulasi dianggap baik, namun kalau ada calon anggota yang ikut mengudara dibina dulu oleh organisasi, ada pemerintah daerah yang menanggung biaya ujian dan diberi perangkat oleh Bupati, ini adalah untuk menjaga kepulauan terluar seperti Kepulauan Anambas. Radio komunikasi untuk perorangan, mereka menyelenggarakan sendiri mau mendanai biaya ujian ditanggung oleh Pemda, di Anambas diberi perangkat oleh Bupati. Di Natuna yang ikut ujian ada 111 orang, ini suatu prestasi yang luar biasa. Operasi pemeliharaan dan pendataan, memvalidkan data SIMS, melakukan cek in di lapangan dengan cara mendatangi, data ORARI belum masuk ke data data SIMS, mungkin sudah memprogramkan untuk memasukan data amatir radio dan RAPI ke SIMS.

Demikian juga untuk ORARI, khusus untuk pengurus setiap tahun diundang ke Batam. Waktu pelaksanaan Ujian UNAR malamnya dilakukan Bimtek, seperti di Natuna, disosialisasikan baik dari sisi peraturan radio diberikan oleh Balmon dan dari sisi teknis dari Organisasi Daerah. Para peserta sudah mewakili semua Kecamatan. Pertanyaannya juga bagus-bagus, untuk didiskusikan seperti Bagaimana pancaran frekuensi tidak melebar, kalau pakai HT jangan pakai boster, dayanya 5 watt, ini dijelaskan. Gangguan yang diakibatkan oleh anggota ORARI belum ada, yang terjadi hanya pengaduan pihak luar terutama frekuensi penerbangan berdekatan dengan frekuensi radio siaran, Natuna dekat dengan Vietnam, diberi arahan supaya tidak menggunakan boster. IOTA dilaksanakan di pulau Andalas, dari sisi pulau mereka juga tahu bahwa tdk mau dikuasai oleh Pihak luar, IOTA merupakan program ORARI daerah, intinya adalah mempromosikan pulau-pulau terluar, bahwa disana ada penduduknya.

g) Wawancara dengan pengurus RAPI Bapak Agus Subekti , Yogyakarta

Revisi peraturan Menteri dimulai Rakornis di Hotel Sahid, adalah kelanjutan Rakornis Pertemuan di Bandung yang ada

catatan frekuensi untuk radio antar penduduk, dari 142 , diperlebar menjadi 140 hingga 149. Pada waktu Rakornis sudah disetujui dalam rakornis tetapi sampai dengan ganti Menteri belum ada realisasinya, Ini menjadi satu cacatan penting untuk revisi regulasi. Selanjutnya beberapa teman luar Yogyakarta, bagi daerah Papua misalnya ongkos membuatnya mahal dan tidak gampang. Dampaknya kalau tidak direvisi, setiap tahun anggota akan bertambah, ini sudah pasti, dan proses komunikasi dibutuhkan forum lebih lebar, saya setuju frekuensi yang ada sekarang ini diperlebar. Pada Permen 34 tahun 2000 pasal 19 ayat 1 disebutkan karena frekuensi radio, pelaksanaan KRAP adalah 142.000 Mhz sampai dengan 143.600 Mhz dengan spasi alur 20 Khz, penjelasan mengenai 20 khz itu ada tidak hubungannya dengan dengan ayat 2) kanal pita frekuensi yang diizinkan untuk VHF penyelenggaraan KRAP untuk pemancar ulang , dimana 142.000, kalau spasi kanal 20 tentu , akan naik menjadi 142.020, tertulis 142.025 , demikian seterusnya menggunakan pemancar ulang , untuk reseivernya 142.025 khz dan alur spasinya tidak sama, ini perlu penjelasan supaya ada konsisten. RAPI sifatnya general tetapi peruntukan dari sekian sampai sekian . Sedangkan Pita Frekuensi Radio untuk HF, adalah frekuensi KRAP 26.965 hingga 27.405 sebanyak 40 kanal dengan alur spasi yang tetap. Sehingga akan menjadi polemik apakah saya menggunakan frekuensi ini benar atau tidak, ini untuk semuanya.

Pancar Ulang Repeater max 50 watt, tetapi kalau diletakkan pada ketinggian 1000 Mdpl , ini akan sampai kemana-mana, Standar ini akan berbeda untuk setiap daerah, kalau di Jakarta , 50 watt akan tabrakan dengan gedung-gedung tinggi. Akan berbeda kalau 50 watt diletakkan di kaki pegunungan yang ketinggiannya 1000 mpl maka akan mambalas kemana-mana. Unsur 50 watt tetap sebagai patokan tetapi faktor ketinggian juga harus dihitung, dan ketinggian itu sebetulnya melekat pada kebutuhan kalau hanya untuk mengcover kabupaten, sehingga solusinya ketinggian tidak dimasalahkan, 50 watt juga tidak, yang diperlukan adalah diberikan delapan frekuensi, kalau ada yang menambah tegakkan aturan. Yang penting sistem ini telah terbangun pemberitaan lewat internet, lalu diudarakan ditampung dulu tidak langsung disambung.

Dengan adanya pelebaran frekuensi aturan yang baru tentang untuk radio pancar ulang (*Repeater*) . ini harus diakui merupakan suatu potensi masalah karena , jika pada Permen 34 hanya frekuensi resmi hanya, dengan alasan geografis, banyak yang didirikan repeater tidak disitu. Karena begitu banyak radio pancar ulang ini penempatan setinggi-tingginya dan sejauh-jauhnya, ada beberapa pengurus memilih penempatan di Jawa Tengah, frekuensi outputnya di RAPI, tetapi inputnya di konsesi, bahkan di Yogyakarta berkembang kearah sana. Usulan saya untuk repeater jangan di batasi 2, ambil sebagai contoh 8, sehingga tidak ada alasan lagi untuk bermain ada frekuensi diluar peruntukan RAPI.

Peran Balmon Dalam pembinaan ORARI diawali dengan menyelenggarakan UNAR, sedangkan untuk pembinaan anggota RAPI dilakukan sangat jarang sekali, sehingga pengguna yang tidak punya izin sangat banyak dan *crowded*, dipenuhi oleh yang tidak punya *call sign*. Balmon harus berani melakukan proses penyidikan , bagi masyarakat kita kalau tidak diawal ditertibkan, penegakkan aturan akan semakin banyak yang melanggar.

Penegakan hukum dapat memperlihatkan keberadaan Balmon minimal satu kali dalam satu tahun untuk diajukan ke pengadilan dan diputuskan mempunyai keberanian dan eksis dalam mengemban otoritasnya. Ketika saya mencari ilmu elektronika saya menggunakan kanal ORARI, selanjutnya apabila saya ingin melakukan komunikasi antar penduduk maka akan dipakai kanal yang diperuntukkan oleh RAPI. Saat ini Balmon hanya melakukan penegakkan hukum pada hal-hal yang bisnis saja, sedangkan bagi pengguna perorangan terbengkalai. Sehingga jiwa patriot dan pejuang dan pelopornya terpendam kalau tidak dirawat dengan baik. Kelemahan RAPI dan ORARI, Perkembangan kedua-duanya mempunyai hal yang sama yaitu bantuan komunikasi, dimana RAPI juga punya orang yang mempunyai hobi uji coba juga ada ada juga yang komunikasi masa. Akibatnya mereka sudah tidak punya tempat dikanalnya. ORARI lalu pindah ke kanal RAPI, Ketika terjebak dengan menarik masa sebanyak-banyaknya nuansa keilmuannya menjadi melemah, sedangkan ujian sekarang sudah formalitas. RAPI dan ORARI *back to basic*, kembali pada kewenangan semula. Untuk menjadi YC dulu harus punya bukti bahwa sudah mampu berhubungan dengan luar negeri.

h) Wawancara Bapak Sulaiman Suseno (wakil ketua RAPI daerah Yogyakarta)

Gagasan membangun repeater RAPI di Desa Pattok di Kabupaten Gunung Kidul didasarkan untuk menghubungkan Yogyakarta dan Jawa Tengah itu secara administrasi adalah berbeda kalau Yogyakarta adalah YZ 12, sedang Jawa Tengah adalah YZ 11, terpisah kalau ORARI masih satu zona 2, kami sadar bahwa lingkaran merapi harus sambung komunikasinya dengan HT, dulu hanya ada sekawasan Yogyakarta saja, pada hal perlu memantau gunung rentan terhadap gunung merapi yang rentan terhadap bencana.

Kalau digital kedepan 2018, prinsip saat itu di waktu merapi, menyatakan *call sign* tidak perlu kalau sudah digital , kasih saja ID, bisa bisa bicara untuk 12 orang secara bersamaan dan otomatis semua harus diberi ID, artinya ID yang terjual *call sign*, kalau *call sign* habis sudah tidak bisa ngomong, besok kominfo bisa mematikan, kalau digital, sedangkan kalau analog bisa ngomong terus. nantinya paling-paling teman-teman mengingatkan agar izin diperpanjang, konsepnya begitu untuk lima tahun ini karena konsep saya sederhana, menjalin lingkaran merapi dan menggaungkan NKRI.

TABEL 3. HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS DAN ANGGOTA ORARI DAN RAPI DI SUMATERA BARAT (KEY INFORMAN : SURI HAMDASIR ANGGOTA RAPI DAN ORARI SUMATERA BARAT)

No	Kategori /Fenomena	Perkembangan	Hasil	Pembinaan oleh Pemerintah dan Organisasi
1.	Proses Percepatan izin	Bukti setor dan rekening giro diemail ke pusat	Percepatan dirasakan oleh anggota	Izin merupakan kebahagiaan tersendiri.
2.	Aktivitas RAPI Melekat dengan kemanusiaan	Bantuan Komunikasi terhadap event Tour de Singkarak.	Yang punya izin taat secara teknis, namun masih banyak mengudara yang tidak punya izin	Kurang Sosialisasi Dari organisasi maupun Balmon
3.	Aktivitas ORARI melalui Gate, server karena percobaan masih eksperimen ORARI.	ORARI, masing mempunyai server karena percobaan.	Cek in sekali seminggu. Range frekuensi sudah dipatuhi sesuai peruntukan u/ repeater, bencana dan lain-lain.	Tertib teknis sudah dibina oleh SDPPI, namun tertib komunikasi belum tersentuh
4.	Organisasi RAPI Menggunakan Repeater di kaki Gunung Talang 1.3,93 Mdpl.	Jangkauan meliputi Sumbar , Jambi dan Rau	Dari segi aturan, tentu melanggar tetapi dari segi topologi daerah sangat membantu	Organisasi Membina komunikasi mulai dari Aceh hingga Papua.

i) Wawancara dengan Pak WIM (Ketua RAPI Lokal Gunung Kidul)

Anggota KRAP luar biasa banyaknya pengguna komunikasi, operating prosedurnya kacau, terdiri atas komunitas-komunitas dan lebih loyal pada komunitas dari pada ke organisasi, frekuensi RAPI 14200- 14360, digunakan oleh *non call siner*, jauh lebih mendominasi dari yang mempunyai izin, sehingga melebar kemana-mana aturan yang digunakan sudah tidak jelas band konsesi maupun band amatir.

Komunitas merasa lebih dulu menggunakan Frekuensi yang berdekatan repeaternya yang besar-besar, seolah-olah ingin menguasai seluruh Jawa, pada hal tidak demikian, repeater itu hanya tugasnya untuk mengcover lingkup daerah Yogyakarta saja dan kalau yang lokal untuk kabupaten Gunung Kidul saja. Pancar ulang kalau *crowded* bagus kalau tidak ada kalimat yang hilang, cara menangkap berita berbeda, penerima harus mencatat di *looksheet*, jam berapa penanggung jawabnya siapa, urutannya bagus ini pekerjaan organisasi.

Untuk penertiban, walaupun di RAPI alokasi repeater ditambah, juga ditambahkan watt, tinggi menara 50 meter, sepanjang tidak mengganggu, orang akan bangga kalau sampai pada daerah lain. Untuk penertiban radio komunitas satu tahun tidak akan rampung.

j) Wawancara dengan Pak Winarto (Anggota ORARI Yogyakarta)

Teknologi Digital perlu dipelajari contoh ada 20 orang pemuda dari Bandung tanpa izin, mereka radio gelap, dikaki merapi mereka langganan jaringan internet, HT dicolokkan bisa berhubungan dengan amatir dunia, dalam kebencanaan sangat cepat reaksinya seluruh dunia, dari titik lokasi bencana dapat diberi bantuan segera dari berbagai pihak. Contoh lain Kerena waktu latihan ke Wonosari , diaplikasikan pada alat ada helicopter, terbang difungsikan bawa kamera, ada berita dari HT, kirim helicopter geser dari sudut pandang yang berbeda jarak terbang 30 menit, lingkungan di lokasi bencana dapat di pelajari sehingga keperluan penyelamatan dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

C. Pengolahan Data Primer

Dalam pengembangan kategori –kategori dan pengkodean , untuk menyusun data dengan memeriksa data untuk mencari keteraturan, topik-topik dan pola-pola, Menurut Emzir, dalam buku Metodologi penelitian kualitatif, analisis data, menyebutkan bahwa, pengembangan sistem pengkodean dalam penelitian kualitatif menyerupai parameter yang sama. Pertanyaan penelitian tertentu dan konsentrasi menghasilkan kategori tertentu. Kita membuat rumpun kode dibawah kategori yang mewakili rumpun tersebut (Emzir 2011;114). Dari tabel hasil wawancara tersebut diatas dapat disortir menjadi beberapa kode-kode seperti kode latar atau kontek, kode situasi, kode proses, kode aktivitas, kode peristiwa kode strategi dan kode naratif.

TABEL 4. HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS DAN ANGGOTA ORARI DAN RAPI DI SUMATERA BARAT (KEY INFORMAN : H. AFRIZUL YUSMAN KARIM PENGURUS RAPI BUKITTINGGI)

No	Kategori /Fenomena	Perkembangan teknologi. Kondisi sosial	Ketaatan	Pembinaan oleh Permerintah dan Organisasi
1.	Teknologi dan komunikasi tidak hebat bila ada bencana	Komunikasi Radio 2 meter dapat bertahan dengan bencana	Anggota Taat pada pengurus dan Tolong menolong dalam bencana	
2.	Aktivitas RAPI Melekat dengan kemanusiaan	Bantuan Komunikasi terhadap event Tour de Singkarak.	Yang punya izin taat secara teknis, namun masih banyak mengudara yang tidak punya izin	Kurang Sosialisasi Dari organisasi maupun Balmon
3.	Aktivitas ORARI melalui Gate, server karena percobaan masih eksperimen ORARI	ORARI, masing mempunyai server karena percobaan.	Cek in sekali seminggu. Range frekuensi sudah dipatuhi sesuai peruntukan u/ repeater, bencana dan lain-lain	Tertib teknis sudah dibina oleh SDPPI, namun tertib komunikasi belum tersentuh
4.	Organisasi RAPI Menggunakan Repeater di kaki Gunung Talang 1.3,93 Mdpl.	Jangkauan meliputi Sumbar , Jambi dan Rau	Dari segi aturan, tentu melanggar tetapi dari segi topologi daerah sangat membantu	Organisasi Membina komunikasi mulai dari Aceh hingga Papua.

Dalam pengembangan kategori melalui rumpun kode proses (Suri Hamdasir : RAPI Sumatera Barat) tabel tersebut diatas dapat diperinci yaitu Proses Percepatan izin, dalam proses telah dilengkapi dengan bukti setor yang di email ke Pusat, namun percepatan izin belum dirasakan oleh anggota. Mendapatkan izin merupakan kebahagiaan tersendiri dalam pergaulan anggota RAPI, sebagai eksistensi diri.

Peristiwa Rumpun kode Peristiwa (Suri Hamdasir : RAPI Sumatera Barat), kode ini diarahkan pada unit data yang berhubungan secara khusus dengan aktivitas khusus yang terjadi dalam latar kehidupan dapat diperinci :

1. Kurangnya Dari organisasi maupun Balmon,
2. Dalam penugasan tertib teknis dibina oleh Ditjen. SDPPI/Balmon, namun tertib komunikasi belum tersentuh.
3. Paling penting adalah sweeping, (Martinus Effendy : ORARI Sumatera Barat) ada tetapi buat yang perorangan terlewatkan, kalau bisa sweeping khusus ORARI dipisahkan dengan RAPI, jangan digabung, karena keduanya saling membocorkan.

Rumpun kode Peristiwa (Daliva dari Rapi Kab. Solok), kode ini diarahkan pada unit data yang berhubungan secara khusus dengan aktivitas khusus yang terjadi dalam latar kehidupan dapat diperinci :

1. Organisasi RAPI Menggunakan Repeater di kaki Gunung Talang 1.3,93 Mdpl. Jangkauan meliputi Sumbar , Jambi dan Rau. Dari segi aturan , tentu melanggar tetapi dari segi topologi daerah sangat membantu.

2. Tertib teknis sudah dibina oleh SDPPI, namun tertib komunikasi belum tersentuh.

3. Organisasi dapat membina komunikasi mulai dari Aceh hingga Papua.

Rumpun kode Aktivitas (Daliva dari ORARI Kab. Solok), data diarahkan pada jenis perilaku yang secara teratur, dan relatif informal :

1. Aktivitas RAPI Melekat dengan kemanusiaan
2. Aktivitas ORARI melalui Gate , server karena percobaan masih eksperimen ORARI, masing mempunyai server karena percobaan. cek in sekali seminggu range frekuensi sudah dipatuhi sesuai peruntukan untuk repeater, bencana dan lain-lainnya.
3. Teknologi dan komunikasi tidak hebat dengan bencana, komunikasi radio 2 meter dapat bertahan dengan terjadinya bencana.
4. Yang punya izin taat secara teknis, namun masih banyak mengudara yang tidak punya izin.

TABEL 5. HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS DAN ANGGOTA ORARI DAN RAPI DI SUMATERA BARAT (KEY INFORMAN : H. AFRIZUL YUSMAN KARIM PENGURUS RAPI BUKITTINGGI)

NO	Kategori /Fenomena	Perkembangan teknologi	Ketaatan	Pembinaan oleh Permerintah dan Organisasi
1.	Percepatan izin belum dirasakan oleh anggota. Banyak yg tidak punya izin	Gate way banyak manfaatnya	Banyak Anggota baru Tidak taat secara teknis	Sosialisasi dan penertiban terhadap pengguna tidak berizin dirasakan sangat kurang.

NO	Kategori /Fenomena	Perkembangan teknologi	Ketaatan	Pembinaan oleh Pemerintah dan Organisasi
2.	Aktivitas RAPI Melekat dengan kemanusiaan	Bantuan Komunikasi terhadap event Tour de Singkarak.	Yang punya izin taat secara teknis, namun masih banyak mengudara yang tidak punya izin	Kurang Sosialisasi Dari organisasi maupun Balmon
3.	Aktivitas ORARI melalui Gate, server karena percobaan masih eksperimen ORARI	ORARI, masing mempunyai server karena percobaan.	Cek in sekali seminggu range frekuensi sudah dipatuhi sesuai peruntukan u/ repeater, bencana dan lain-lain	Tertib teknis sudah dibina oleh SDPPI, namun tertib komunikasi belum tersentuh
4.	Organisasi RAPI Menggunakan Repeater di kaki Gunung Talang 1.3,93 Mdpl.	Jangkauan meliputi Sumbar, Jambi dan Rau	Dari segi aturan, tentu melanggar tetapi dari segi topologi daerah sangat membantu	Organisasi Membina komunikasi mulai dari Aceh hingga Papua.

TABEL 6. HASIL WAWANCARA DI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (KEY INFORMAN : IWAN, KASI OPERASI PEMELIHARAAN, BATAM)

No	Kategori/ Fenomena	Pengembangan /Proses	Hasil	Pembinaan
1.	Data Base ORARI dan RAPI belum terpelihara/-terbentuk	Animo Masyara-kat tetap bertahan karena kondisi Kepulauan	Ketaatan terhadap regulasi dianggap baik	Balmon undang Anggota RAPI dalam Bimtek dan tertib berbicara Pembinaan calon Amatir oleh organisasi
2.	IOTA dilaksana-kan pulau Andalas	Menciptakan kondisi sosial kemasyarakatan berdekatan dengan negara tetangga	Dampaknya diharap-kan dapat memper-tahankan pulau-pulau terpencil	Stasiun radio non komersial lancar berkomunikasi di wilayah Indonesia yang lokasinya terluar
3.	Pulau Anambas diberi perangkat dan biaya ujian oleh Bupati	Mempromosikan pulau terluar di Indonesia	Kesadaran pemerintah kabupaten	
4.	Sosialisasi bagi para anggota ORARI	Sudah mewakili semua Kabupaten dan Kecamatan	Kerjasama antara pemerintah Daerah dan Balmon.	BIMTEK, di Puau Natuna sosialisasi peraturan radio oleh Balmon dan sisi teknis dari Organisasi Daerah.

Menjadi kode Aktivitas (Martinus Effendy : Orari Sumbar) yang diarahkan pada jenis perilaku yang teratur :

1. Orari dalam perkembangannya telah bisa berhubungan dengan Pekanbaru dan Jambi setelah dikuatkan dengan repetater di Gunung Singgalang dan Gunung padang, sehingga hubungan dengan Kota Solok biasanya dapat sekarang sudah bisa
2. Komunikasi kegiatan pengupdate data melalui data base di Balmon belum terbentuk.

Dalam pengembangan kategori melalui pengkodean tabel tersebut diatas dapat diperinci menjadi Kode Aktivitas (Iwan, Kasi OPP Balmon Batam) yang diarahkan pada jenis perilaku yang teratur :

1. Kegiatan pengupdate data, melalui data base di Balmon belum terbentuk dan belum dapat dilaksanakan, sedangkan data bertambah dengan meningkatnya animo masyarakat menggunakan radio perorangan.

2. Kegiatan Bimtek di pulau natuna, mensosialisasikan regulasi, peraturan radio dan dari sisi tenis. Peserta telah mewakili setiap Kecamatan pada seluruh Kabupaten di Batam.
3. IOTA dilaksanakan di Pulau Andalas, di Pulau Anambas bupatinya mengerakkan penduduk setempat untuk punya radio dan dapat menggunakannya, dalam ujian UNAR.

Pemerintah daerah Pulau Anambas bersama dengan Balmon memfasilitasi agar masyarakatnya mempunyai alat komunikasi radio antar penduduk atau perangkat amatir radio.

Kategori kedua stasiun radio perorangan non komersial yang lancar berkomunikasi ke Luar Negeri.

TABEL 7. HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS DAN ANGGOTA ORARI DAN RAPI DI YOGYAKARTA (KEY INFORMAN : AGUS SUBEKTI, SEKRETARIS DAERAH RAPI YOGYAKARTA)

No	Kategori/ Fenomena	Perkembangan Sosial Dan Teknologi	Ketaatan Pada Peraturan	Pembinaan
1.	Banyak bermain diluar peruntukan pengguna yang tidak punya izin sangat banyak dan crowded.	Perkembangan sosial, adanya Permintaan frekuensi radio untuk RAPI dari 142, diperlebar menjadi 140 hingga 149.	Balmon harus lebih berani untuk melakukan penindakan.	ORARI pembinaan melalui UNAR, sedangkan untuk pembinaan anggota RAPI dilakukan sangat jarang sekali
2.	Konsistensi alur spasi kanal tidak konsisten, Permen 34 tahun 2000 pasal 19 ayat 1 karena frekuensi radio, RPU .	Pelaksanaan KRAP adalah 142.000 Mhz sampai dengan 143.600 Mhz dengan spasi alur 20 Khz, Jelas aturannya.	ayat 2) kanal pita frekuensi yang diizinkan untuk VHF tidak jelas kanal spasinya	KRAP untuk pemancar ulang dimana 142. 000, kalau spasi kanal 20 tentu, akan naik menjadi 142.020, tertulis 142.025
3.	Pancar ulang cenderung sumber masalah	Penempatan setinggi-tingginya /untuk mencapai sejauh-jauhnya	Penempatan antenna pada, ketinggian 1000 Mdpl, ini akan sampai kemana-mana	Unsur 50 watt tetap sebagai patokan tetapi faktor ketinggian ter-gantung pada kebutuhan meng-cover Kabupaten/ kabupaten.
4.	Nuansa keilmuan Anggota ORARI melemah	Bercampur RAPI dan ORARI menjadi sama tidak berbeda	ORARI menempati kanal RAPI	YC Kemampuan komunikasi LN terabaikan .

Dari hasil wawancara (Agus Subekti : RAPI Yogyakarta) tersebut dapat dikodekan beberapa dibawah kategori :

1. Kode Situasi, untuk menempatkan data dimana mereka dapat melihat diri mereka sendiri seperti :
 - a. Pengguna yang tidak punya izin sangat banyak sehingga komunikasi menjadi crowded .
 - b. Nuansa keilmuan Anggota ORARI melemah , sebagai indikatornya ajang latihan diri untuk komunikasi dengan luar negeri terabaikan.
 - c. Permintaan frekuensi radio untuk RAPI dari 142 , diperlebar menjadi 140 hingga 149.
2. Kode Proses (Agus Subekti : RAPI Yogyakarta) untuk menggunakan kode proses memperhatikan orang, kelompok, organisasi atau aktivitas. Dalam tabel diatas dapat diperinci sebagai berikut :
 - a. Alur kanal pada Permen 34 tahun 2000, ps 19 ayat 1, apabila dihubungkan dengan ayat 2 tidak konsisten. KRAP untuk pemancar ulang dimana 142. 000, kalau spasi kanal 20 tentu, akan naik menjadi 142.020, tertulis 142.025.

- b. Pancar Ulang sering sumber masalah, dimana penempatan antenna setingginya dapat menjangkau sejauh-jauhnya, mereka berpendapat penempatan antenna sesuai dengan kebutuhan organisasi dan sesuai dengan tingkatan organisasinya, kalau di Kabupaten, jangkanya lingkup kabupaten, kalau organisasi daerah menjadi lingkup organisasi daerah.

Dalam mengkodekan tabel tersebut diatas, dapat dikelompokkan pada kode peristiwa, (Sulaiman Suseno : Wakil Ketua RAPI Yogyakarta) dimana kejadian khusus dengan aktivitas khusus yang jarang terjadi atau hanya ditemui satu ini. Dimana dengan modal sendiri berinisiatif untuk membangun pemancar ulang yang dapat dimanfaatkan oleh club atau anggota RAPI, yang bersangkutan mempunyai penafsiran untuk membangun lingkaran merapi yang rawan bencana, dapat menyatukan Jawa Tengah dan Yogyakarta, mengikuti teritorial TNI.

TABEL 8. HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS DAN ANGGOTA ORARI DAN RAPI DI YOGYAKARTA (KEY INFORMAN : SULAIMAN SUSENO, WAKIL KETUA RAPI YOGYA)

No	Kategori/ Fenomena	Perkembangan Sosial Dan Teknologi	Ketaatan Pada Peraturan	Pembinaan
1	Inisiatif Repeater membangun Lingkaran Merapi	Memadukan Jawa Tengah dan Yogya	Penafsiran Peraturan melalui pendekatan teritorial ABRI	

TABEL 9. HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS DAN ANGGOTA ORARI DAN RAPI DI YOGYAKARTA (KEY INFORMAN : WIM (KETUA RAPI LOKAL GUNUNG KIDUL))

No	Kategori/ Fenomena	Perkembangan Sosial Dan Teknologi	Ketaatan Pada Peraturan I	Pembinaan
1.	Komunikasi pd pita 14200-14360 didominasi oleh yang tdk punya call sign	Melebar kemana-mana. Berlomba membuat repeater	Penertiban tidak sejak awal, makin lama makin meluas, susah ditertibkan	Organisasi tidak mampu menegakkan aturan

No	Kategori/ Fenomena	Perkembangan Sosial Dan Teknologi	Ketaatan Pada Peraturan I	Pembinaan
2.	Balmon sangat luas cakupan monitoringnya	Pengembangan organisasi belum mengarah pada spesialisasi	Penertiban untuk amatir dan RAPI jarang	Sosialisasi jarang dilakukan oleh Balmon
3.	Organisasi mengejar kuantitas jumlah anggota	Kualitas terabaikan	Ketaatan pada aturan menjadi lemah	Materi/isi Komunikasi, antara ORARI dan RAPI sering sama

TABEL 10. HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS DAN ANGGOTA ORARI DAN RAPI DI YOGYAKARTA (KEY INFORMAN : WINARTO (ANGGOTA SENIOR ORARI YOGYAKARTA))

No	Kategori/ Fenomena	Perkembangan Sosial Dan Teknologi	Ketaatan Pada Peraturan I	Pembinaan
1.	Adanya Radio Adu superioritas antar pemuda	Antara aturan dan Praktek sangat jauh, menggunakan 1000 Watt	Mengganggu bermain diluar batas power	Pendekatan senior untuk meredam Radio balap
2.	Teknologi digital diprakarsai oleh pemuda Bandung untuk bantuan bencana	Menggunakan internet berkomunikasi dengan amatir dunia	Membantu gempa dan bencana gunung Mereapi	Pembinaan organisasi kearah ini sudah ada

Kode Situasi (Wim : RAPI Gunung Kidul), untuk menempatkan data dimana mereka dapat melihat diri mereka sendiri seperti :

- Komunikasi Peruntukan RAPI pada pita 14200-14360 didominasi oleh yang tidak punya *call sign*.
- Penertiban tidak sejak awal, makin lama makin meluas, susah ditertibkan Organisasi tidak mampu menegakkan aturan.
- Organisasi hanya mengejar kuantitas jumlah anggota materi/isi komunikasi, antara ORARI dan RAPI sering sama;
- Balmon sangat luas cakupan monitoringnya, penertiban untuk amatir dan RAPI jarang dan tugas Balmon tidak ada spesialisasi ORARI dan RAPI.

Rekomendasi kode situasi ini mereka mengharapkan pengembangan organisasi Balmon, atau UPT sejenis yang menangani materi isi komunikasi, seperti di daerah juga ada UPT yang menggunakan anggaran pusat untuk mengerjakan penugasan pemerintah yang kosong, tidak ada yang menangani.

Kode aktivitas tabel (Winarto : ORARI Yogyakarta) tersebut diatas diarahkan pada jenis perilaku yang secara terus menerus dilakukan dan relatif informal seperti :

- Adu superioritas dalam menggunakan radio Amatir maupun RAPI, sehingga aktivitas ini banyak melanggar aturan yang ada , sehingga antara regulasi dan praktek dilapangan tidak sama , menjadi potensi gangguan bagi internal maupun masyarakat. Anak-muda /pemula menyebutnya radio Balap.
- Pengembangan teknologi digital, upaya latih diri dengan menggunakan internet dapat berkomunikasi dengan amatir luar negeri, sehingga sangat memudahkan penanganan

situasi darurat. Pembinaan ORARI sudah diarahkan kesana.

D. Analisis Data Sekunder

1) Izin Amatir Radio

Data sekunder dari jumlah pemegang izin Amatir Radio diperlukan sebagai pembandingan dalam analisis data dan interpretasi data lapangan yang telah diperoleh dalam wawancara mendalam.

Izin Amatir Radio (IAR). Menurut peraturan masa laku IAR untuk tingkat pemula 2 tahun, tingkat siaga 3 tahun tingkat penggalang 5 tahun dan tingkat penegak 5 tahun (Kepmen33/2009, psl 5, ayat (3)), sehingga jumlah izin tidak bisa dijumlahkan secara otomatis, diperlukan pengurangan data bagi yang naik tingkatan. Namun kalau diasumsikan belum naik tingkatan selama 4 tahun maka pemegang izin IAR dapat dijumlahkan untuk mengetahui minimal kekuatan yang ada pada suatu daerah yang menggunakan radio perorangan.

Kalau dibuat perbandingan pengguna radio perorangan yang memiliki izin amatir radio (IAR) pada daerah survey adalah sebagai berikut : DKI Jakarta : 2186, Jawa Barat : 3769, Yogyakarta : 1254, Sumatera Barat : 699 dan Kepulauan Riau : 159.

Potensi dari organisasi amatir radio, dapat digambarkan sebagai kemampuan organisasi yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan nasional yang bekerja dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan peralatan komunikasi sendiri untuk membantu menyelamatkan jiwa manusia, harta benda, bantuan darurat dilaksanakan sampai komunikasi menjadi normal dari dan ke daerah bencana dapat berfungsi kembali.

Kemampuan atau kekuatan yang belum terwujud atau yang telah terwujud yang dimiliki oleh organisasi, tetapi belum digunakan secara maksimal dapat diklasifikasi pada

kemampuan dasar, tingkat inteligensi, abstraksi, logika dan daya tanggap. Disamping itu diperlukan etos kerja, seperti ketekunan, ketelitian dan daya tahan terhadap tekanan menjadi suatu bagian dari potensi yang dapat diandalkan bagi para penggiat amatir radio, yang tidak kalah pentingnya adalah kepribadian yang meliputi pola yang menyentuh semua kemampuan, perbuatan serta emosional yang ditaati secara khas dibawah aneka pengaruh luar.

2) Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)

Data sekunder dari jumlah pemegang izin komunikasi Radio Antar Penduduk diperlukan sebagai pembanding dalam analisis data dan interpretasi data lapangan yang telah diperoleh dalam wawancara mendalam.

Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (IKRAP) Menurut peraturan masa lalu IKRAP diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang menurut Keputusan Menteri 34/2009 : ps 5, ayat (3), sedangkan jenis IKRAP meliputi : Baru, Pembaruan, dan IKRAP perpanjangan. Dengan berlakunya lima tahun, selama rentang waktu tersebut dapat menjaring jumlah data IKRAP dimana setiap tahun ada yang memperpanjang, sehingga data Jumlah seluruhnya akurat menjadi data aktif IKRAP.

Potensi yang dimiliki organisasi komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dengan aktivitasnya melekat pada kemanusiaan, sosial dan olah raga. RAPI dalam hal kebencanaan RAPI mengambil inisiatif di lapangan baik waktu pra-bencana maupun pasca-bencana, semangat anggota itu luar biasa besar, sehingga berapa anggota mengambil keputusan untuk mengembangkan kemampuannya, posisinya sehingga tidak hanya masalah komunikasi saja melainkan termasuk dalam Resque, Akhirnya berkembang oleh karena itu perlu dipahami bahwa RAPI memberi dukungan komunikasi, sebagai partner bantuan komunikasi.

E. Analisis Data Primer

Dengan merekam apa yang dikatakan key informan dan menarik kesimpulan tentang situasi sosial mengenai pembinaan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk yang mereka ketahui. Dalam mengkerangkakan pemahaman terhadap pembinaan radio perorangan yang non komersial, menampilkan isu kunci pada situasi sosial dalam hal : perkembangan teknologi, pemahaman regulasi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Selanjutnya isu yang mengemuka akan diuraikan lebih jauh untuk mengarah pada pembuktian baik bersifat confirming atau disconfirming. Penguatan/penekanan pada fokus bahasan tertentu dipresentasikan, membuat penulis memahami kasus isu tersebut dan generalisasinya dituntun oleh regulasi yang terkait.

Sebagai analisis final setelah meninggalkan lapangan. dimana banyak dikumpulkan subjek-subjek yang berbeda atau mempunyai kode rumpun yang sama ,Untuk mengembangkan fokus penelitian tentang apa yang dilakukan dan sehingga ada beberapa hal yang menarik perhatian dan

menjadi perhatian utama adalah fokus pada pembinaan penggunaan radio perorangan yang non komersial. Untuk mencari gagasan utama dari penulis tetap berpegang pada subjek bahasan. Dari berbagai format alur pikiran dari kategori diperinci sampai pada pengkodean, dari kode yang sama dikombinasi menjadi satu format alur narasi.

1) Penggunaan frekuensi radio untuk Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia

Hasil penelitian di lapangan terdapat banyaknya pengguna amatir radio dan radio antar penduduk yang tidak memiliki izin, sehingga keadaannya sangat tidak kondusif bagi perkembangan keberadaan amatir radio dan radio antar penduduk. Bagi yang memiliki izin diperlakukan tidak adil, yang punya izin taat secara teknis, namun masih banyak mengudara yang tidak punya izin. Suatu contoh komunikasi menjadi *crowded*, selain itu komunikasi peruntukan radio antar penduduk pada pita kanal frekuensi radio 14200-14360 Mhz. didominasi oleh yang tidak punya *call sign*. Sosialisasi dan penertiban terhadap pengguna tidak berizin dirasakan sangat kurang baik dari organisasi amatir radio Indonesia dan radio antar penduduk Indonesia.

Perkembangan sosial, adanya permintaan frekuensi radio untuk radio antar penduduk dari 142, diperlebar menjadi 140 hingga 149.

2) Ketaatan dan tingkat kepatuhan para anggota Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia terhadap Peraturan Perundangan dan Disiplin Organisasi.

Tingkat kepatuhan hanya berada pada anggota murni bagi anggota sedangkan yang tidak patuh adalah pengguna yang ilegal. Dalam penggunaan spektrum frekuensi radio perorangan ada tiga buah rumah yaitu yang bernaung dibawah organisasi amatir radio Indonesia, yang tujuan hobby dan latih diri, bernaung dibawah radio antar penduduk indonesia merupakan rumah pengguna frekuensi untuk komunikasi kemasyarakatan , dan ada lagi rumah yang bernaung dengan izin stasiun radio yang menampung kegiatan bisnis. Masyarakat penggiat yang ingin berbisnis sudah ada tempatnya , tetapi banyak yang bercampur ke rumah Organisasi Radio Amatir Indonesia dan radio Antar Penduduk Indonesia.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio saat ini cenderung baru mengamankan yang memiliki izin stasiun radio, dilakukan monitoring dan penertiban, sedangkan untuk Organisasi Amatir Radio Indonesia dan Radio Antar Penduduk Indonesia sangat jarang dilakukan penertiban sampai ke pengadilan.

3) Pembinaan penggunaan frekuensi radio untuk Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia.

Dalam pembinaan kualitas amatir radio, pembinaan calon anggota meliputi peraturan telekomunikasi , teknik elektronika , komunikasi dengan kode morse.

Peningkatan pengetahuan melalui diskusi dan seminar , komunikasi jarak jauh (*Qsling dan Awards hunting*), digital komunikasi dan satelite serta peraturan dan ketentuan amatir

radio. Peragaan uji coba peralatan teknik amatir dilaksanakan di Yogyakarta dengan peralatan yang dibuat sendiri. Kontes komunikasi pada Band VHF, dan HF 80 meter pesertanya sangat kurang memerlukan dorongan lebih lanjut. *Island on Air* telah dilaksanakan oleh beberapa daerah ternyata perlu pembinaan mengenai tujuannya.

Maritim mobil diizinkan pemerintah setelah peragaan Arung Samudra 1995, saat ini kurang mendapat sambutan dari anggota.

Penyuluhan dan pelaporan pelanggaran melalui media masa pada organisasi setempat. Secara bertingkat lintas negara dilaporkan ke IARU, Regio 3 monitoring serta melaksanakan DF foxhunting baik internal maupun dengan Polri.

Dalam pengawasan dan pengendalian pelaporan secara berkala mulai dari orlok, orda sampai pada orpus belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan stasiun monitoring belum berfungsi dengan baik. Juga belum semua Orlok dan Orda mempunyai data tentang pelanggaran frekuensi di daerahnya masing-masing. Penataan Organisasi masing-masing tingkat organisasi dari segi administrasi dan prasarana sekretariat belum ada pusat informasi data.

Langkah yang dilakukan oleh Organisasi Pusat adalah dengan menerbitkan buletin dan *call book* secara periodik. Peningkatan hubungan antara sekretariat lokal, daerah dan pusat lebih intensif, Himbuan pada instansi pemerintah dan swasta untuk tidak menggunakan frekuensi radio untuk amatir.

Peningkatan kemampuan teknik radio dan mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi mengenai pengetahuan, riset dan teknologi.

Kegiatan dalam dukungan operasional dalam berbagai *event* seperti angkutan lebaran, pramuka dan olah raga.

Dukungan komunikasi dalam keadaan darurat seperti penanggulangan kebakaran hutan, bencana alam, kecelakaan kapal laut & Ferry, tanah, longsor, banjir huru hara penggulan kemanan sebagai mitra polisi.

Penegakan hukum di bidang Spektrum frekuensi radio khususnya pengguna frekuensi untuk perorangan, tahapan yang dilakukan adalah : Tahap preventif, dilakukan pada saat sosialisasi peraturan perundangan dan saat penerbitan izin, melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Tahap penertiban dilakukan sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan.

Dalam penegakan hukum bagi penggiat frekuensi radio untuk perorangan ini masih lemah dimana para penggiat mewabah menimbulkan gangguan bertahun-tahun karena tidak tertib dan merasa nyaman dan tidak ada aturannya, sedangkan penggiat yang mempunyai izin juga sebaliknya bertahun-tahun mengalami ketidaknyamanan karena taat pada aturan.

4) Pemanfaatan perkembangan teknologi terhadap Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia

Perkembangan teknologi terutama perkembangan teknologi komputer dan internet banyak mempengaruhi kegiatan amatir radio seperti berkembangnya potensi Nasional

untuk komunikasi kemasyarakatan yang dapat menunjang komunikasi darurat yang kegiatan sehari-harinya seperti : melakukan eksperimen, kegiatan komunikasi, kegiatan pengabdian masyarakat dan kegiatan monitoring,

Perkembangan teknologi telekomunikasi sangat mempengaruhi aktivitas amatir radio yang pada mulanya komunikasi suara menjadi komunikasi data dan gambar seperti AMSAT, TV amatir, Amtor, Paktor, Packet, RTTY, PSK, dan lain sebagainya.

Amatir Packet radio merupakan sistem komunikasi radio digital yang masih relatif baru pada dunia keamatiran. Kemampuan sistem ini sangat luas dalam pendeteksian kesalahan dan pembentukan jaringan komputer dengan menggunakan radio sebagai media komunikasi.

Semua sudah dilaksanakan oleh sebagian anak muda yang ada di Bandung pada waktu gunung merapi meletus mereka datang kesana dengan hanya membawa laptop saja.

5) Analisis Rumpun Kode

Yang ditemukan dilapangan yaitu rumpun kode proses, rumpun kode aktivitas, dan rumpun kode peristiwa. rumpun kode situasi yang menjadi subjek pembicaraan.

Rumpun kode Proses

Peralihan dari status, peralihan waktu yang menjadi pembicaraan subjek dapat digabung sebagai berikut:

- Proses Percepatan izin (Suri Hamdasir: RAPI Sumatera Barat), dalam proses telah dilengkapi dengan bukti setor yang di email ke Pusat, namun percepatan izin belum dirasakan oleh anggota. Mendapatkan izin merupakan kebahagiaan tersendiri dalam pergaulan anggota RAPI, sebagai eksistensi diri.
- Alur kanal pada Permen 34 tahun 2000, pasal 19 ayat 1, apabila dihubungkan dengan ayat 2 tidak konsisten. KRAP untuk pemancar ulang dimana 142.000, kalau spasi kanal 20 tentu, akan naik menjadi 142.020, tertulis 142.025, (Subekti : Sekretaris Daerah RAPI Yogyakarta).
- Pancar Ulang sering sumber masalah, dimana penempatan antenna setingginya dapat menjangkau sejauh-jauhnya, pada hal seharusnya mereka berpendapat penempatan antenna sesuai dengan kebutuhan organisasi dan sesuai dengan tingkatan organisasinya, Kalau Kabupaten, jangkauan lingkup kabupaten, Kalau Organisasi Daerah menjadi Lingkup Daerah. (Subekti : Sekretaris Daerah RAPI Yogyakarta).

Rumpun kode Peristiwa

Kode ini diarahkan pada unit data yang berhubungan secara khusus dengan aktivitas khusus yang terjadi dalam latar kehidupan dapat diperinci;

- Tertib teknis sudah dibina oleh SDPPI, namun tertib komunikasi belum tersentuh (Daliva : RAPI Kab Solok).
- Yang paling penting adalah sweeping, (Martinus Effendy : ORARI Sumatera Barat) ada tetapi buat yang perorangan terlewatkan, kalau bisa sweeping khusus ORARI dipisahkan dengan RAPI, jangan digabung, karena keduanya saling membocorkan.

- c). Kurangnya Sosialisasi peraturan Perundang-undangan (Suri Hamdasir: RAPI Sumatera Barat), dari organisasi maupun Balmon,

Rumpun kode Aktivitas

Data diarahkan pada jenis perilaku yang secara teratur , dan relatif informal :

- Aktivitas RAPI Melekat dengan kemanusiaan (Daliva dari ORARI Kab. Solok).
- Aktivitas ORARI melalui Gate , server karena percobaan masih eksperimen ORARI, masing mempunyai server karena percobaan. cek in sekali seminggu (Daliva dari ORARI Kab Solok).
- Kegiatan pengupdate data, melalui data base di Balmon belum terbentuk dan belum dapat dilaksanakan, sedangkan data bertambah dengan meningkatnya animo masyarakat menggunakan radio perorangan (Iwan, Kasi OPP Balmon Batam).
- Kegiatan bimbingan teknis di pulau natuna, mensosialisasikan regulasi dari Balmon, peraturan radio dan dari sisi teknis oleh organisasi. Peserta telah mewakili setiap kecamatan pada seluruh kabupaten di Batam (Iwan, Kasi OPP Balmon Batam).
- Kegiatan IOTA dilaksanakan di pulau andalas, di pulau anambas bupatinya mengerakkan penduduk setempat untuk punya radio dan dapat menggunakannya, dalam ujian UNAR (Iwan, Kasi OPP Balmon Batam).

Rumpun Kode Situasi

Untuk menempatkan data dapat melihat, seperti :

- Pengguna yang tidak punya izin sangat banyak sehingga komunikasi menjadi *crowded*. (Subekti : Sekretaris Daerah RAPI Yogyakarta).
- Yang punya izin taat secara teknis, namun masih banyak mengudara yang tidak punya izin (Daliva : ORARI Kab Solok)
- Nuansa keilmuan Anggota ORARI melemah , sebagai indikatornya ajang latihan diri untuk komunikasi dengan luar negeri terabaikan (Subekti : Sekretaris Daerah RAPI Yogyakarta).
- Komunikasi Peruntukan RAPI pada pita 14200-14360 didominasi oleh yang tidak punya *call sign*, (Wim : RAPI Gunung Kidul).
- Penertiban tidak sejak awal akan semakin meluas, susah ditertibkan Organisasi tidak mampu menegakkan aturan (Wim : RAPI Gunung Kidul)

a). Kategori Pengawasan

- Permintaan frekuensi radio untuk RAPI dari 142, diperlebar menjadi 140 hingga 149 (Subekti : Sekretaris Daerah RAPI Yogyakarta)
- Organisasi hanya mengejar kuantitas jumlah anggota Materi/isi Komunikasi, Antara ORARI dan RAPI sering sama.

Kode Strategi

Tersebut diatas diarahkan pada taktik, metode, teknik dan cara lain yang digunakan orang untuk berbagai hal :

- Adu superioritas dalam menggunakan radio Amatir maupun RAPI, sehingga aktivitas ini banyak melanggar aturan yang ada, sehingga antara regulasi dan praktek dilapangan tidak sama, menjadi potensi gangguan bagi internal maupun masyarakat. Anak-muda /pemula menyebutnya radio Balap (Winarto dari Orari Yogyakarta).
- Pengembangan teknologi digital, upaya latihan diri dengan menggunakan internet dapat berkomunikasi dengan amatir luar negeri, sehingga sangat memudahkan penanganan situasi darurat (Winarto dari Orari Yogyakarta).
- Organisasi RAPI Menggunakan Repeater di kaki Gunung Talang 1.393 Mdpl. Jangkauan meliputi Sumatera Barat, Jambi dan Propinsi Riau. Dari segi aturan, tentu melanggar tetapi dari segi topologi daerah sangat membantu (Daliva : Rapi Kabupaten Solok).
- Dengan modal sendiri berinisiatif untuk membangun pemancar ulang yang dapat dimanfaatkan oleh club atau anggota RAPI, Yang bersangkutan mempunyai penafsiran untuk membangun lingkaran merapi yang rawan bencana, dapat menyatukan Jawa Tengah dan Yogyakarta, mengikuti teritorial TNI (Sulaiman Suseno : Wakil Ketua RAPI Yogyakarta).
- Teknologi dan komunikasi tidak hebat dengan bencana, Komunikasi Radio 2 meter dapat bertahan dengan terjadi bencana (Daliva dari ORARI Kabupaten Solok).

6) Analisis Kategori

Dalam rumpun kode situasi dalam alur penelitian dapat pengembangan kategori, pertama yang kita lakukan adalah properti, kemudian dapat didimensikan. Properti adalah sebuah atribut dari sebuah kategori. Sedangkan properti dapat menjadi dimensi yang bervariasi disepanjang kontinum dalam fenomena pengawasan khususnya untuk Amatir Radio dan RAPI. Secara grafis, dalam Pengawasan pemanfaatan spektrum frekuensi radio khusus untuk perorangan (RAPI/ORARI) dapat dipresentasikan sebagai berikut:

TABEL 11. KATEGORI, PROPERTI DAN RENTANG DIMENSIONAL UNTUK RUMPUN KODE SITUASI

Kategori	Properti	Rentang Dimensional
Pengawasan	Komunikasi Radio	Crowded
	Yang tidak berizin	Tidak taat secara teknis

Kategori	Properti	Rentang Dimensional
	Pita 14200-14360	Dipenuhi oleh yang tidak punya call sign
	Penertiban tidak dari awal	Sangat susah menertibkannya
	Kuantitas anggota	Banyak, sedangkan kualitas sedikit
Dalam kondisi situasi pengawasan tersebut diatas muncul usulan untuk memperlebar alokasi Frekuensi untuk RAPI semula 14200-1430 menjadi 14200-14000.		
Sumber : Rumpun kode		

b). Kategori Superioritas

TABEL 12. KATEGORI, PROPERTI DAN RENTANG DIMENSIONAL UNTUK RUMPUN KODE AKTIVITAS

Kategori	Properti	Rentang Dimensional
Superioritas	Adu Power	Sampai 1000 watt
	Latih diri lewat internet	Lebih banyak hubungan dengan luar negeri
	Adu tinggi Menara	Jauh jangkauan
Berbagai taktik, metode, teknik dan cara lain untuk menjadi superioritas		
Balmon sangat luas cakupan monitoringnya. Penertiban untuk amatir dan RAPI jarang dan tugas Balmon tidak ada spesialisasi untuk ORARI dan RAPI (Winarto : Orari Yogyakarta)		
Sumber : Rumpun kode		

c). Kategori Kepatuhan

Kepatuhan terhadap regulasi spektrum frekuensi radio, khusus untuk perorangan (RAPI/ORARI) dapat dipresentasikan sebagai berikut :

TABEL 13. KATEGORI, PROPERTI DAN RENTANG DIMENSIONAL UNTUK RUMPUN PROSES

Kategori	Properti	Rentang Dimensional
Kepatuhan	Tertib Teknis	Sesuai dengan aspek teknis
	Tertib Administrasi	Terkendala
	Sosialisasi	Jarang
	Bimtek	Natuna
	UNAR	3 kali pertahun
	Penertiban	Jarang
	Update data ORARI dan RAPI di Balmon	Terkendala

Pembinaan ORARI sudah diarahkan kesana. Harapan mereka agar Balmon dapat memperlihatkan keberadaannya dalam membina komunikasi radio perorangan ada aktivitas sifatnya yang tegakkan aturan dan agar di fasilitasi pengembangannya dengan menyiapkan regulasinya (Winarto : Orari Yogyakarta).

Sehingga yang menjadi catatan disini adalah keseriusan Pemerintah Daerah ikut memperhatikan perkembangan ORARI dan RAPI. Jelas disini pemerintah daerah Pulau Anambas bersama dengan Balmon memfasilitasi agar masyarakatnya mempunyai alat komunikasi Radio Antar penduduk atau perangkat Amatir radio.

Dalam membangun kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan ORARI dan RAPI dapat dikatakan bahwa tertib teknis bagi yang punya izin sudah memperhatikan aspek teknisnya, tertib administrasi masih terkendala pada organisasi, sedangkan untuk sosialisasi dan penertiban jarang dilakukan. Dalam pembinaan kepatuhan dilakukan dengan Ujian Amatir Radio (UNAR) yang dilaksanakan 3 kali dalam

satu tahun. Sedangkan mengupdate data ORARI dan RAPI di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio masih terkendala.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penggunaan frekuensi radio untuk perorangan khususnya amatir radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia di lokasi penelitian belum kondusif, dalam arti masih banyak penggiat amatir yang liar memenuhi frekuensi radio atau yang tidak memiliki izin. Dalam kategori Superioritas penggunaan frekuensi radio diwarnai oleh adu power, adu tinggi antenne, jauh jangkauan, dan latih diri melalui internet. dalam superioritas ini ada sisi positif dan sisi negatifnya.
2. Tingkat kepatuhan hanya berada pada anggota murni, sedangkan yang tidak patuh adalah pengguna yang ilegal. Dalam kategori Kepatuhan , diwarnai oleh tertib teknis oleh yang punya izin, tertib administrasi masih terkendala oleh organisasi, sedangkan untuk melakukan penertiban

khusus untuk ORARI dan RAPI jarang dilakukan. Kategori Pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk ORARI dan RAPI diwarnai oleh komunikasi radio yang *crowded*, banyak yang tidak punya izin, Pita 14200-14360 dipenuhi oleh yang tidak punya izin, anggota banyak tetapi yang berkualitas sedikit.

3. Pembinaan kualitas amatir radio, peningkatan pengetahuan melalui diskusi dan seminar, peningkatan kemampuan teknik radio dan mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi mengenai pengetahuan, riset dan teknologi.
4. Perkembangan teknologi telekomunikasi sangat mempengaruhi aktivitas amatir radio dan radio antar penduduk yang pada mulanya komunikasi suara menjadi komunikasi data dan gambar. Kemampuan sistem ini sangat luas dalam pendeteksian kesalahan dan pembentukan jaringan komputer dengan menggunakan radio sebagai media komunikasi.

B. Saran

1. Dalam kondisi situasi pengawasan tersebut diatas muncul usulan untuk memperlebar alokasi Frekuensi untuk RAPI semula 14200-1430 menjadi 14200-14000.
2. Perlu dilakukan penertiban baik yang dilakukan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tetapi juga di harapkan Organisasi yang mewadainya melakukan pengawasan dan penertiban terhadap anggotanya.
3. Perutama pembinaan yang dilakukan kepada anggota amatir radio dan radio antar penduduk dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dengan mengurus perizinan.
4. Pengguna amatir radio dan radio antar penduduk selalu meningkatkan kualitas berkomunikasi dengan pertemuan berkala dan memperbarui perangkat dengan teknologi yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Berman. E.M.(2003), *Implementation of ethics in organization*. Dalam *Encyclopedia of public Administration and Public Policy*. Diedit oleh Jack Rabin. New York. N.Y: Marcel Dekker , Hal 461-464.
- Budiawan, B. B. (2012). *Pembangunan Sistem Informasi Klinik Gigi Dental Smile Menggunakan Framework Codeinteger*. UAJY.
- Budiono. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*, Cetakan kedua. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Cooper. T.L. (1998), *The Responsible Administrator*. 4 th Edition. San Fransisco C.A: Yosey-Bass Publisher.
- Denhardt, Janet, V., and Denhardt, Robert, B. (2003). *The New Public Service : Serving, not Steering, USA* : M.E. Sharpe.
- Denzin, Norman K (2005). *The Art and Politics of interpretation : dalam Denzin & Lincoln. (1994) Handbook of qualitative Research, London: sage Publication*.
- Donahue, AK. (2003), *Ethics and Public Policy* Dalam *Encyclopedia of Public Administration and public policy*. Diedit oleh Rabin New York. N.Y.: Marcel Dekker . Hal.469-473.
- Emzir, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data*. Jakarta : Rajawali Press, Hal 63.
- Hallowell, Roger, Leonard A. Schlesinger, Jeffrey Zornitsky, (1996), *Internal Servis Quality, Customer and Job Satisfaction : Linkages and Implications for management, Human Resource Planning, Journal, Vol.19, No 2, ABI/INFORM Global*.
- Hamidi, (2010), *Metode penelitian kualitatif, pendekatan Praktis, Penulisan Proposal dan laporan*, Malang : UMM.Press.
- Henry, Nicolas, (1995), *Public Administration and Public Affair*, Sixth Edition Enngelwood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall International. Inc.
- Nugroho, Riant, (2008), *Public Policy*, Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The fifth estate-Metode, Jakarta : PT .Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Patton, M. (1990). *Qualitative evaluation and research methods (pp.169-186)*.Beverly Hills, CA: Sage.
- Purwanto, (2007), *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan , Pengembangan dan Pemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widowati, E. & Achjari (2004). *Pengukuran Konsep Efektifitas Sistem Informasi: Penelitian Pendahuluan (pp:33-47)*. Yogyakarta : SNATI.